

Analisis Framing Berita Terkait Kebijakan Pemerintah Menangani Covid-19 pada Media *Online* Suarasurabaya.Net

Analysis of News Framing Related to Government Policy Handling Covid-19 in Suarasurabaya.Net Online Media

Kurnia Lailatul Mabrurroh

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah

*email korespondensi: kurnialailatul15@gmail.com

ARTIKEL INFO

Keywords:

*Framing analysis;
government; covid-19;
PPKM Darurat policy*

kata Kunci:

*Analisis pembedakan;
pemerintah; covid19;
Kebijakan Darurat PPKM*

ABSTRACT

This article describes the ability of the media to formulate an issue that is then shaped into an important public information. The online media used is an Suarasurabaya.net, which is a fairly active local media reporting a period of suspension of community activities. The primary focus in this study was to identify Suarasurabaya.net construction of an issue. Researchers use descriptive qualitative methods and use the theory of framing Robert N. Entman by analyzing the content of the news text of an Suarasurabaya.net related strategies made by the government to handle the coronavirus by enforcing a containment of community mobilization. Suarasurabaya.net indicates an exception to the government in dealing with the covid-19 outbreak. We can see from its electoral source that only raises the opinion of the government without taking the outside view of the ruling elements such as public opinion with diverse backgrounds.

ABSTRAK

Artikel ini menjabarkan terkait kemampuan media dalam menyusun suatu kejadian atau isu kemudian dibentuk menjadi sebuah informasi penting bagi publik. Media online yang digunakan adalah Suarasurabaya.net dimana media ini dinilai merupakan media lokal yang aktif dalam update berita PPKM Darurat. Bagaimana Suarasurabaya.net dalam mengkonstruksi suatu isu untuk dijadikan sebuah berita merupakan fokus paling utama untuk dilakukan analisis terhadap pemberitaan yang disajikan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif serta menggunakan teori analisis framing Robert N. Entman dengan menganalisis isi teks pada berita oleh Suarasurabaya.net tentang strategi pemerintah dalam menangani covid-19 dengan memberlakukan pembatasan pada kegiatan masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah dalam mengkonstruksi berita terkait kebijakan PPKM Darurat, Suarasurabaya.net menunjukkan kecondongannya terhadap pemerintah dalam menangani wabah covid-19. Hal tersebut mampu diamati dari sisi pemilihan narasumber yang secara keseluruhan dari beritanya hanya mengangkat opini dari elemen pemerintah tanpa mengambil sudut pandang dari luar pemerintahan seperti masyarakat dengan berbagai latar belakang..

PENDAHULUAN

Sejak kemunculannya pada awal Maret 2020 lalu, wabah covid-19 menjadi ancaman terbesar seluruh dunia hingga saat ini. Dalam merespon fenomena ini, Pemerintah Indonesia menetapkan PPKM Darurat (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Jawa dan Bali pada awal bulan Juli Tahun 2021 sebagai upaya penanganan covid-19. Untuk mengantisipasi wabah virus corona, Pemerintah Indonesia perlu untuk mengeluarkan kebijakan tersebut yang akan disampaikan kepada masyarakat secara gamblang. Penyampaian suatu kebijakan harus direncanakan dengan matang karena apabila suatu komunikasi publik tersebut tidak terencana dengan baik, maka akibatnya adalah masyarakat menjadi panik atau tidak percaya terhadap informasi-informasi terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Media massa sangat memiliki peran penting dalam kontrol kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi covid-19. Keberadaan jurnalisme sangatlah penting, informasi yang diberitakan oleh media akan memberi dorongan terhadap kontrol kebijakan Pemerintah Indonesia. Dinamika dari suatu media sendiri dianggap mendapat pengaruh baik dari dalam maupun dari luar instansi tersebut. Artinya, jika ingin mengetahui suatu media berpihak kemana maka dapat dilihat dari isi teks berita media itu sendiri. "Media bukanlah sepenuhnya tempat kosong, terdapat pengaruh dari dalam dan luar terhadap proses penyusunan berita. Faktor *internal* yang mempengaruhi isi media terbagi menjadi beberapa tingkatan yakni: 1) individu pekerja media; 2) pengaruh media; 3) organisasi media. Sedangkan faktor *eksternal* yang mempengaruhi isi media terbagi menjadi: 1) level ekstra media, contohnya pemodal, partai politik, 2) level ideologi", (Pamella J. Reese, 1996).

Peneliti akan menggunakan media *online* Suarasurabaya.net sebagai subjek penelitian. Dimana peneliti ingin mengetahui bagaimana Suarasurabaya.net memframing berita mengenai opsi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk penanganan pandemi. Masing-masing media memiliki ciri khas yang berbeda-beda dalam menyajikan suatu berita tentang pandemi covid-19 ini. Seperti media *online* Suarasurabaya.net, merupakan salah satu media *online* yang diawali dari Radio Suara Surabaya dan merupakan bagian dari Suara Surabaya Media. Hingga pada akhirnya *go online* dengan melahirkan media *online* Suarasurabaya.net.

Alasan peneliti memilih Suarasurabaya.net karena media ini lahir dari radio konvensional Suara Surabaya 100 FM yang telah menggunakan konsep format radio *news* dan informasi yang interaktif sejak tahun 1995 berikut tim redaksi interaktif atau *getkeeper* dengan motto *news*, interaktif, dan solutif yang mendapatkan minat luar biasa dari pemirsa Jawa Timur khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya. Memasuki era digital seperti sekarang ini, Suara Surabaya mengembangkan sebuah berita *online* berupa teks berita *online*, radio internet, *radio on demand*, *video on demand*, bahkan hingga informasi prakiraan cuaca. Untuk mengetahui Suarasurabaya.net dalam memframing berita, peneliti akan mengambil sebanyak 15 berita untuk dianalisis. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana media *online* Suarasurabaya.net menyajikan berita yang membahas langkah pemerintah dalam menekan laju penyebaran covid-19 di tanah air serta bagaimana Pemerintah Indonesia membangun strategi komunikasi kepada publik dalam menangani covid-19 pada pemberitaan oleh Suarasurabaya.net?

Analisis framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana cara pandang wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itulah yang akan menentukan fakta apa saja yang diambil, bagian mana yang harus dihilangkan dan mana yang harusnya ditonjolkan, serta akan dibawa kemana berita tersebut. Oleh karena itulah diperlukan metode

analisis framing untuk melihat cara pandang oleh suatu media. Sasaran dari analisis framing adalah sebagai metode analisis wacana dengan menemukan peraturan serta norma-norma dibalik suatu teks berita. Dalam perspektif komunikasi, analisis framing dilakukan guna mengidentifikasi pemikiran suatu media dalam membangun realitas apakah sesuai dengan fakta atau tidak. Analisis yang dikenalkan oleh Entman ini, diterapkan dengan alasan untuk mengkaji peristiwa yang sesungguhnya terjadi kemudian menjabarkan peristiwa itu menjadi berita.

Media *online* tergolong *new media* jebolan dari media sebelumnya. *New media* adalah gabungan dari perkembangan dunia digital yaitu internet. Adapun beberapa keuntungan yang diperolehnya dibanding media konvensional, antara lain (Romli, 2012): 1) publik lebih leluasa untuk memilah berita yang diinginkan, 2) jurnalis lebih mudah dalam menghadirkan berita, serta khalayak pun lebih fleksibel dalam menikmati berita yang diinginkan, 3) berita yang dipublikasikan melalui portal *online* akan dapat tersimpan sehingga publik dapat dengan mudah mencarinya apabila ingin mengaksesnya kembali, 4) jumlah berita yang disajikan lengkap, 5) berita melalui media *online* dapat diakses lebih cepat dibandingkan dengan media konvensional, 6) pendukung kinerja redaksi dalam menyertakan teks, gambar, ataupun elemen-elemen lainnya, 7) dukungan publik terhadap pemberitaan secara langsung.

Komunikasi massa merupakan komunikasi melalui media massa, baik *audio visual* maupun media cetak. Pesan komunikasi itu dibagikan kepada masyarakat dalam jangka waktu tidak berubah-ubah. Adapun kriteria dari komunikasi massa yaitu komunikasi massa menggunakan media massa *audio visual* maupun media cetak. Kriteria lainnya yang menggambarkan komunikasi massa antara lain: 1) Pesan yang disampaikan sifatnya bukan privasi; 2) menghadirkan kekompakan; 3) tergolong komunikasi satu arah; 4) Tidak langsung memberikan umpan balik; 5) Komunikan anonim dan heterogen; 6) Mengutamakan isi daripada hubungan. Isi pemberitaan umumnya merupakan hasil dari penyusunan suatu peristiwa dengan menggunakan perangkat dasarnya. Artinya, dalam menyajikan berita suatu media terkadang menyajikan “madu”, serta tidak menutup kemungkinan menyajikan “racun”. Artinya, suatu media bisa saja menyajikan berita tidak baik namun dikemas menggunakan bahasa yang baik. Hal itu memperlihatkan bahwa media massa bukanlah hal yang harus dipercaya sebenar-benarnya.

Isu pemberitaan dan informasi terkait covid19 masih menjadi topic pembahasan yang menarik untuk diteliti. Beberapa penelitian terkait dengan analisis framing berita tentang covid19. Penelitian terdahulu yang pertama yaitu penelitian oleh Maulidatus Syahrotin Naqqiyah pada Agustus tahun 2020. Penelitian ini menganalisis teks pemberitaan kasus covid-19 pada portal *online* CNNIndonesia.com dan Tirto.Id. bertujuan ingin mengetahui bagaimana kedua media *online* tersebut membingkai berita kasus covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis framing model Pan dan Kosicki. Hasil dari analisis pada penelitian ini menjelaskan bahwa media *online* CNNIndonesia.com pada struktur sintaksisnya lebih menekankan peran pemerintah sehingga dapat menggiring opini positif oleh khalayak luas. Sedangkan media *online* Tirto.Id dalam keseluruhan strukturnya lebih menekankan kepada tenaga medis sehingga memberikan pengaruh baik bagi publik untuk tetap tenang dan waspada.

Penelitian terdahulu yang kedua yaitu penelitian oleh Kheyene Molekandella Boer, Mutia Rahmi Pratiwi dan Nalal Muna pada Juni tahun 2020. Penelitian ini memiliki tujuan guna untuk mengidentifikasi pemberitaan terkait Gugus Tugas menangani wabah virus corona pada 3 portal *online* yaitu, Kompas.com, Liputan6.com, dan CNNIndonesia.com. Penelitian ini menggunakan

metode kualitatif dengan analisis framing model Entman. Penelitian ini menjelaskan bahwasannya hasil *Define Problem* pada artikel pemberitaan yang berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mengajak para *influencer* bukanlah jalan keluar yang tepat, *Diagnose Cause* ditunjukkan dengan sikap ketidakpedulian oleh para anak muda dalam menghadapi fenomena ini, *Make Moral Judgement* ditunjukkan dengan wujud bahwa *influencer* menjadi sukarelawan untuk pelaksanaan program ini, kemudian untuk solusi yang ditawarkan adalah sebelum para *influencer* menjadi penyampai pesan kepada para generasi milenial, para *influencer* terlebih dahulu mendapatkan pembekalan pemahaman terkait sikap menghadapi pandemi covid-19 oleh pemerintah.

Penelitian terdahulu yang ketiga adalah penelitian oleh Merry Fridha Tri Palupi dan Rahmat Edi Irawan pada Oktober tahun 2020 Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana media Kompas.com dan Malaysiakini mengemas pemberitaan aturan pemerintah tentang ketenagakerjaan akibat dampak covid-19. Portal berita *online* dari Indonesia dan Malaysia ini memberitakan perkembangan kasus covid-19 di masing-masing negaranya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif analisis framing Entman. Dengan menerapkan teori ilmu konstruksi, hasil dari pembahasan ini adalah terdapat ketimpangan narasumber, artinya hanya melihat dari satu sudut pandang. Yang mana Kompas.com mbingkai informasi terkait upah pekerja hanya berdasar opini pelaku usaha saja. Sedangkan dengan Malaysiakini mbingkai berita tentang pembatalan libur hari raya yang disampaikan oleh *opinion leader*, Mufti P Pinang.

Penelitian terdahulu keempat yaitu penelitian oleh Kasirul Fadli, Haryati, Prinda Novita, Setiawan pada April tahun 2021. Tujuan dilakukannya riset ini untuk mengetahui bagaimana Tribunnews.com dan Wartakepri.co.id dalam mbingkai pemberitaan covid-19. Dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teori framing Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki. Berdasarkan dengan analisis pada pemingkai berita tersebut, penelitian ini menghasilkan makna bahwa kedua media diatas saling memberikan perbedaan dalam mengkonstruksi berita terkait pandemi covid-19.

Penelitian terdahulu yang kelima yaitu oleh Heppy N Y Haloho, Salman pada Juli 2021 bertujuan untuk membedah serta membandingkan framing dari Kompas.com dan Tempo.co terkait usaha yang dilakukan untuk penanganan covid-19 di tanah air. Peneliti menerapkan pendekatan kualitatif model analisis terhadap isi teks berita dengan menggunakan teori konstruksi realitas sosial media massa. Hasil pembahasannya ditandai dengan peneliti menemukan bahwa Kompas.com dan Tempo.co masing-masing memiliki gaya framing yang berbeda. Framing yang dilakukan oleh Kompas.com yaitu memberitakan bahwa kebijakan penanganan covid-19 masih belum efektif karena komunikasi publik pemerintah yang masih buruk. Oleh sebab itu, pemerintah diharap mampu memperbaiki strategi komunikasi kepada publik. Sedangkan framing oleh Tempo.co membahas bahwa kebijakan penanganan covid-19 tidaklah efektif diakibatkan oleh buruknya kinerja dari pemerintah. Hasil dari pembahasan ini menegaskan bahwa framing media terhadap suatu peristiwa atau isu tersebut bergantung dari sudut pandang serta keberpihakan suatu pihak.

Penelitian terdahulu yang keenam yaitu oleh Wulan Adellita Dwisandi Setiaji pada Agustus tahun 2021. Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya kelonjakan angka positif corona di tanah air. Riset bertujuan guna mengidentifikasi framing yang dilakukan oleh JawaPos.com terkait pemberitaan dengan judul "Intensifkan Peran Kampung Tangguh Jaya demi Tekan Penyebaran Covid-19". Metode untuk mengumpulkan data yaitu dengan melakukan observasi secara *online* dengan *download* berita pada portal *online* JawaPos.com kemudian mendokumentasikannya

berupa tangkapan layar berita yang akan dianalisis dalam media *online* tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif menggunakan azas analisis framing Zhongdang dan M. Kosicki. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa berita telah melaksanakan fungsi struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik.

Penelitian terdahulu yang ketujuh yaitu penelitian oleh Pesona Asmaul Husna, Ferina Meliasanti, Hendra Setiawan pada tahun 2021. Membahas perbandingan framing berita covid-19 yang dilakukan Kumparan.com dan BeritaSatu.com dan bertujuan untuk mendefinisikan perbandingan analisis framing oleh kedua media *online* tersebut. Dengan menempuh metode deskriptif kualitatif menggunakan teori analisis framing William A. Gamson dan pengumpulan data menggunakan sistem dokumentasi. Pembahasan yang dihasilkan penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan cara membingkai berita dari Kumparan.com dan BeritaSatu.com yang disebabkan oleh kedua media *online* tersebut tidak termasuk ke dalam teori William A. Gamson disebabkan adanya ketidak lengkapan unsur didalamnya.

Penelitian terdahulu yang kedelapan yaitu penelitian oleh Nina dan Triyanto pada tahun 2021. Penelitian ini membicarakan tentang pemberitaan pandemi virus corona pada Kompas.com, CNNIndonesia.com, Liputan6.com dan Okezone.com menggunakan analisis framing dan membahas efek dari sudut pandang ilmu psikologi bagi masyarakat. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Pembahasan yang dihasilkan adalah keempat media tersebut memiliki pengaruh yang signifikan untuk publik. Berdasarkan dari hasil framing terhadap keempat media *online* tersebut, keempatnya masih dalam batas keobjektifan dengan mengangkat berita sesuai dengan realitas yang sesungguhnya. Dari segi bahasa serta nilai lainnya tidak ditemukan bukti penggiringan opini negatif yang dapat menyebabkan ketakutan oleh masyarakat. Analisis framing masih berada dalam jalur pemberitaan yang baik dalam jurnalisme. Karena pemberitaan media *online* sangat membawa pengaruh bagi psikologis masyarakat.

Penelitian terdahulu yang kesembilan yaitu penelitian oleh Rosida Simatupang pada Maret 2021. Penelitian dilakukan guna membedah framing pemberitaan covid-19 pada wilayah Ibukota Jakarta oleh Kompas.com. Menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan teori analisis framing Pan dan Kosicki. Diketahui bahwa Kompas.com pro terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Anis Baswedan yaitu dilakukannya karantina khusus untuk Jakarta. Kompas.com juga dianggap tidak menerapkan prinsip akurasi jurnalisme bencana dikarenakan tidak melakukan kofirmasi terhadap data.

Kemudian penelitian terdahulu yang terakhir yaitu penelitian oleh Urip Mulyadi dan Mubarok pada Desember 2021. Riset ini memiliki tujuan untuk mengetahui framing dari Detik.com dan Kompas.com mengenai berita yang diangkat yaitu tentang wabah corona di tanah air. Metode yang diterapkan yaitu kualitatif dengan pendekatan paradigma konstruktivisme serta menggunakan teori analisis framing Pan dan Kosicki. Penelitian ini menyatakan bahwa Detik.com dan Kompas.com menjalankan peran media sebagai kontrol sosial dalam pengkonstruksian berita untuk merespons kepanikan masyarakat di tengah wabah virus corona. Kedua media *online* tersebut memiliki kesamaan tema dalam menginformasikan usaha yang wajib dilakukan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi situasi ini dengan tetap waspada dan tenang, serta menjalankan pola hidup yang sehat.

METODE

Pada penelitian ini digunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan atas dasar metodologi yang mengkaji fenomena sosial dan manusia. Untuk mengetahui konstruksi pemberitaan terkait kebijakan PPKM Darurat yang ditetapkan pemerintah pusat pada portal berita *online* Suarasurabaya.net. Peneliti menggunakan teori analisis framing model Entman yang mengacu pada 4 cara yakni sebagai berikut: mendefinisikan masalah, siapa yang dianggap sebagai penyebab masalah, memberi penilaian terhadap keputusan moral, memberikan solusi penyelesaian masalah. (Entman, 1993).

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan data primer dan sekunder. Pada data primer peneliti mengambil sampel berita sebanyak 15 berita dari portal berita *online* Suarasurabaya.net yang membahas soal strategi kebijakan Pemerintah Indonesia menangani covid-19. Kemudian untuk data sekunder diperoleh dengan melakukan proses analisis framing, menggunakan referensi jurnal serta laporan penelitian terdahulu untuk dijadikan pedoman oleh peneliti dalam melakukan proses pengumpulan data. Di bawah ini merupakan tabel klasifikasi dari 15 sampel berita yang dipilih:

NO.	KODE BERITA	JUDUL BERITA	WAKTU
1.	A1	Presiden Umumkan Pemberlakuan PPKM Darurat Jawa-Bali Mulai 3 Sampai 20 Juli 2021	Kamis, 1 Juli 2021, 12:01 WIB
2.	A2	Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Faktor Penting Supaya PPKM Darurat Efektif Menekan Kasus Covid-19	Juma'at, 2 Juli 2021, 07:11 WIB
3.	A3	13 Instruksi Mendagri Soal PPKM Darurat untuk Kepala Daerah, Salah Satunya Soal Bansos dan Jaring Pengaman Sosial	Jum'at, 2 Juli 2021, 20:20 WIB
4.	A4	Menteri Agama Siapkan Aturan Penutupan Sementara Tempat Ibadah di Daerah PPKM Darurat	Jum'at, 2 Juli 2021, 22:07 WIB
5.	A5	Pemerintah Gandeng <i>Provider</i> untuk Lacak Pergerakan Warga Saat PPKM Darurat	Minggu, 4 Juli 2021, 10:41 WIB
6.	A6	DPR Minta Pemerintah Larang WNA Masuk Indonesia Selama PPKM Darurat	Senin, 5 Juli 2021, 09:43 WIB
7.	A7	PPKM Darurat, Strategi Penting Turunkan Laju Penularan Covid-19	Kamis, 8 Juli 2021, 19:11 WIB

8. A8	Muhadjir: Presiden Putuskan Perpanjangan PPKM Darurat Sampai Akhir Juli	Jum'at, 16 Juli 2021, 18:14 WIB
9. A9	PPKM Darurat Ganti Nama Menjadi PPKM Level Empat	Kamis, 22 Juli 2021, 09:23 WIB
10. A10	Presiden: Ada Tren Penurunan Kasus Covid-19 Setelah 23 Hari PPKM	Minggu, 25 Juli 2021, 21:59 WIB
11. A11	Satgas Covid-19 Mengatur Syarat Pelaku Perjalanan Sesuai Ketentuan PPKM Level 1-4	Selasa, 27 Juli 2021, 10:27 WIB
12. A12	Begitu Penjelasan, Kenapa Pemerintah RI Menerapkan PPKM Daripada <i>Lockdown</i>	Sabtu, 31 Juli 2021, 20:03 WIB
13. A13	PTM Terbatas Dapat Dilakukan Pada Satuan Pendidikan di Wilayah PPKM Level 1-3	Selasa, 10 Agustus 2021, 19:32 WIB
14. A14	Pemerintah Akan Lanjutkan PPKM Selama Masih Ada Covid-19 di Tanah Air	Selasa, 17 Agustus 2021, 13:21 WIB
15. A15	Kasus Covid-19 Mulai Menurun, Pemerintah Lakukan Penyesuaian Aturan PPKM	Senin, 23 Agustus 2021, 21:07 WIB

HASIL PENELITIAN

Profil Suarasurabaya.Net

Radio Suara Surabaya yang merupakan induk dari media *online* Suarasurabaya.net, merupakan lembaga penyiaran swasta paling aktif mengiringi perkembangan teknologi untuk memenuhi kebutuhan para pendengarnya. Radio Suara Surabaya kemudian disebut dengan SS FM dengan format siaran adalah *news*-interaktif, dan solutif (Hadi, 2014). *News* fokus kepada informasi, kemudian interaktif bermakna sebagai pola multi komunikasi dan solutif yakni berinovasi memberikan manfaat dari program siaran. Nama Suara Surabaya sejatinya memang ditujukan untuk menyuarakan suara rakyat Surabaya dan sekitarnya. Namun pada media *online* Suarasurabaya.net tentunya sama seperti halnya pada media-media *online* lainnya yang selalu ingin berkembang dengan memberikan informasi nasional yang bukan hanya mengangkat wilayah lokal saja seperti Surabaya dan sekitarnya.

Suarasurabaya.net awalnya berfungsi hanya sebagai *website* yang digunakan untuk *streaming* siaran Radio Suara Surabaya. Pada tahun 1997, tampilannya berisi *link* untuk mendengarkan radio melalui sambungan *internet*. Konten dari Suarasurabaya.net sebelumnya hanyalah memuat apapun

yang diputar di radio, namun sejak adanya keharusan untuk mencari berita sendiri untuk keperluan Suaraturabaya.net, redaksi *on air* dapat mengambil materi siaran dari web. Di tahun 2008, media ini telah resmi mengembangkan konvergensi melalui *radio streaming*, *video streaming* dan *radio on demand*. Selanjutnya pada tahun 2009, Suara Surabaya kembali mengembangkan konvergensi dengan membuat *fanspage* E100 di *facebook*. Tahun 2010 tampil di @SSFM100 dan *mobile broadcast* di *Blackberry* dan pada tahun 2012 kembali mengembangkan *mobile application* di *Android* dan *iOS* (Asy'ari & Luthfi, 2018:4). Konsep “integrasi, berita dari web, mobile, dan media sosial ke radio, begitu juga sebaliknya” tetap diterapkan hingga saat ini.

Rencana pemikiran yang dilakukan Suara Surabaya Media telah searah dengan pendapat dari (Sedyaningsih, 2018:55) bahwa koordinasi suatu media adalah proses penyatuan antara media dengan bidang sektor industri maupun telekomunikasi dan komputasi, serta merupakan wujud interaksi dalam bentuk digital. Seluruh media menyatu menjadi satu kesatuan portal berita Suaraturabaya.net dengan laman radio *online* di portal Suaraturabaya.net. Pada portal berita *online*, Suaraturabaya.net menampilkan menu-menu dengan kategori berita masing-masing. Diantaranya ada kelana kota, politik, ekonomi bisnis, Indonesia bangkit, olahraga, *jazz traffic*, senggang dan kondisi lalu lintas.

Peminat dari Suaraturabaya.net sendiri bisa dipungkiri tentunya lebih banyak diakses oleh masyarakat lokal wilayah Surabaya dan sekitarnya. Meski begitu, Suara Surabaya merupakan salah satu media yang memiliki eksistensi pada industri platform berita dengan posisi platform berita yang berkualitas dengan menerapkan azas *citizen journalism*. Melalui beragam tampilan di media sosial, untuk pertama kalinya pada tahun 2010 Suara Surabaya mulai aktif menyalurkan konten melalui *twitter* dan *facebook*. Suara Surabaya juga mendistribusikan konten melalui *instagram* yang saat ini diikuti oleh 565 ribu pengikut. Hal tersebut ditujukan untuk memudahkan dalam menyalurkan pengetahuan yaitu dengan meningkatkan partisipasi aktif dari publik sebagai pemirsa aktif.

Narasi Berita

Pada berita A1 membahas tentang Presiden Joko Widodo yang telah mengumumkan diberlakukannya PPKM Darurat khusus wilayah Jawa & Bali yang mulai diterapkan pada tanggal 3-20 Juli 2021. Dilansir dari suaraturabaya.net, menurut Jokowi kebijakan ini diterapkan berdasarkan hasil dari diskusi para menteri, ahli kesehatan dan kepala daerah. Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa terjadi lonjakan kasus covid19 yang sangat signifikan yaitu sebanyak 21.807 ribu orang. Sehingga mengharuskan pemerintah untuk bergerak cepat dengan mengeluarkan kebijakan PPKM Darurat untuk menekan laju penularan covid19 di tanah air.

Pada berita A2 membahas tentang pemerintah yang bersinergi agar PPKM Darurat dapat berjalan sesuai tujuan dengan menghimabu tegas kepada masyarakat untuk membantu menyukseskan kebijakan PPKM Darurat sebagai langkah menekan laju penyebaran covid19. Pada periode pertama pemberlakuan PPKM Darurat menargetkan penurunan kasus 10 ribu per harinya. Wiku Adisasmito yang merupakan juru bicara Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 berpendapat, sekeras apapun pemerintah mengeluarkan kebijakan namun apabila masyarakat tidak disiplin maka PPKM Darurat tidak akan efektif. Pada berita A2 disebutkan selampemberlakuan PPKM Darurat, sektor esensial seperti perbankan, teknologi dan informasi, perhotelan yang bukan

untuk menyediakan fasilitas karantina covid19, industri ekspor dapat tetap beroperasi dengan catatan. Untuk sektor yang boleh beroperasi 100 persen yakni kesehatan, transportasi dan logistik, penanganan bencana, industri makanan dan minuman serta bahan pokok masyarakat sehari-hari.

Berita A3 membahas persoalan tentang Mendagri, Muhammad Tito Karnavian yang mengeluarkan 13 instruksi yang ditujukan untuk para pemimpin masing-masing wilayah agar mampu mengendalikan mobilitas masyarakatnya di tengah tingginya angka covid-19 di tanah air. Instruksi tersebut berupa salah satunya tentang jaring percepatan penyaluran bantuan sosial dan pengaman sosial. Artinya, pemerintah diminta dengan cepat melaksanakan program bantuan sosial dan pengaman sosial dari APBD. Selain itu, instruksi Mendagri juga menyebutkan terkait pembatasan mobilitas warga, syarat untuk pengguna transportasi, target tes covid-19, jaminan keamanan oleh TNI dan Polri serta memberikan tugas untuk setiap kepala daerah dalam mensukseskan program vaksinasi. Sedangkan instruksi Mendagri terkait kegiatan sektor esensial seperti perbankan, hotel yang bukan untuk karantina covid-19, supermarket, pasar tradisional, wajib membatasi pengunjung hingga 50% dari kapasitas normal. Untuk sektor kritical seperti logistik, keamanan, kesehatan, transportasi, industri makanan dan minuman, penanganan bencana, utilitas dasar seperti listrik dan air tersebut diperbolehkan untuk melakukan kegiatan berlangsung 100%.

Sementara untuk kantor pelayanan publik diperbolehkan beroperasi dengan syarat jumlah staf tidak boleh melebihi kapasitas normal yaitu 25%. Kemudian untuk acara resepsi pernikahan dengan catatan ruangan acara hanya diperbolehkan diisi oleh maksimal 30 orang. Untuk proses kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara virtual, sedangkan mall maupun pusat perbelanjaan dan sejenisnya dilarang beroperasi kecuali terdapat akses restoran dengan sistem take away / delivery (dibawa pulang). Sedangkan kapasitas dalam transportasi umum dibatasi dengan kapasitas maksimal 70% dari biasanya dan wajib vaksin dosis pertama dengan hasil negatif antigen/PCR durasi maksimal 2x24 jam.

Berita A4 membahas tentang putusan Menteri Agama soal penutupan sementara tempat ibadah semua agama yang diakui Indonesia pada wilayah PPKM Darurat. Selain itu pada berita ini juga membahas terkait aturan saat hari raya idul adha 1442H yang dimana Menteri Agama memutuskan bahwa sholat idul adha dilakukan di rumah masing-masing dan melarang adanya takbir keliling. Aturan tersebut diterbitkan sebagai bentuk upaya dari Kementerian Agama untuk mendukung berjalannya PPKM Darurat. Yaqut Cholil, sebagai Menteri Agama menyampaikan bahwa mayoritas organisasi keagamaan menyetujui usulan tersebut selama PPKM Darurat. Selalin itu, Yaqut juga menyampaikan terkait pelaksanaan sholat Idul Qurban 1442 Hijriah dilakukan di rumah dan takbir keliling tidak diperbolehkan sementara waktu.

Berita A5 yang membahas soal pemerintah yang akan menggandeng beberapa platform digital dan provider untuk melakukan pelacakan terhadap masyarakat selama masa PPKM. Menurut Jodi Mahardi selaku juru bicara Menko Kemaritiman dan Investasi mengatakan upaya tersebut merupakan salah satu bentuk untuk mengurangi resiko penularan oleh kerjasama kedua belah pihak. Begitupun dengan TNI dan Polri juga telah menambah pasukannya guna menegakkan hukum tegas bagi siapapun yang melanggar PPKM Darurat sesuai UU yang diterapkan. Sebagaimana berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang harus disiplin terhadap peraturan pada tiap

instansi (bagi aparat daerah yang melanggar), UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan KUHP pasal 212-218. Dalam berita ini ditekankan bahwa masing-masing dari kepala daerah dapat menjalankan langkah-langkah preventif untuk mencegah penyebaran virus corona.

Pada berita A6 membahas terkait pernyataan Sufmi Dasco Ahmad yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI meminta agar Pemerintah Indonesia tegas melarang Warga Negara Asing berkunjung ke Indonesia selama PPKM dengan alasan apapun. Menurutnya salah satu faktor pemicu yang menyebabkan meningkatnya jumlah kasus infeksi covid-19 yaitu adalah virus-virus varian baru yang dibawa oleh warga negara asing ke Indonesia ataupun WNI dari luar negeri. Hal ini menjadi sorotan setelah terdapat longgarnya akses masuk oleh 20 WNA berasal dari China sebagai tenaga kerja asing yang masuk melalui Provinsi Sulawesi Selatan.

Berita A7 membahas tentang perlunya PPKM Darurat diberlakukan sebagai salah satu upaya dalam mencegah penyebarluasan virus corona di tanah air. Keadaan di Jakarta menjadi penyebab diberlakukannya PPKM Darurat. dr. Widyastuti MKM selaku Kepala Dinkes DKI Jakarta menuturkan apabila di Jakarta sendiri jumlah kasus harian covid-19 bisa mencapai 91 ribu per hari. Oleh karena itulah penting diberlakukannya PPKM Darurat sebagai pencegah meningkatnya kasus covid-19 di tanah air. Dalam berita ini ditegaskan kembali sektor yang diizinkan beroperasi. Seperti, diberlakukannya pembatasan waktu diaktifkan pada pusat perbelanjaan yang dibatasi hingga jam 8 malam waktu sekitar dengan daya tampung pengunjung 50%. Lokasi peribadatan maupun tempat wisata ditutup sementara, restoran menerapkan sistem take away (dibawa pulang). Sementara untuk kapasitas ruang transportasi hanya dibatasi maksimal 70%. Selain itu, penegakan hukum selama pemberlakuan PPKM Darurat akan terus dilakukan yang fokus terhadap pengamanan dan distribusi vaksin.

Berita A8 membahas tentang Muhadjir Effendy selaku Menko PMK yang menyatakan apabila Presiden RI telah memperpanjang PPKM Darurat hingga akhir Juli 2021. Ia juga menjelaskan bahwa keputusan Joko Widodo untuk memperpanjang PPKM Darurat dianggap memiliki banyak resiko, salah satunya dalam menyeimbangkan antara pendisiplinan warga dalam mentaati protokol kesehatan dengan mendistribusikan bantuan sosial. Menurut Muhadjir, bansos tidaklah mungkin terus ditanggung pemerintah, harus ada gotong royong dengan rakyat dan dengan sejumlah lembaga. Selain itu, Muhadjir menyinggung bahwa sedekah masker juga penting karena tidak sedikit orang menganggap bahwa masker adalah barang yang mahal.

Berita A9 membahas persoalan tentang PPKM Darurat yang diubah nama menjadi PPKM Level 4. Hal tersebut dikatakan oleh Airlangga Hartarto Menko Bidang Perekonomian pada Rabu, 21 Juli 2021 dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual. Beliau menyampaikan bahwa putusannya telah melalui diskusi dengan para gubernur. Dijelaskan bahwa pergantian nama tersebut atas dasar arahan dari WHO yakni transmisi dan kapasitas respons. Berdasarkan kriteria wilayah PPKM level 4 yaitu kasus konfirmasi positif sebanyak 100 ribu jiwa diatas 150. Tingkat perawatan per 100 ribu jiwa diatas 30.

Berita A10 membahas tentang adanya tren penurunan kasus terinfeksi covid-19 di beberapa wilayah Pulau Jawa akibat dari PPKM Darurat yang dilanjutkan dengan PPKM Level 4 yang dimulai

dari tanggal 3-25 Juli 2021. Namun, Joko Widodo menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terlena akan adanya tren ini. Selain menghimbau kepada rakyatnya, ia juga memerintahkan para menteri untuk meningkatkan pembagian obat-obatan dan layanan pemeriksaan pasien covid-19 yang tengah melakukan isolasi maupun yang dirawat di rumah sakit. Sementara untuk wilayah dengan kasus kematian yang tinggi, Presiden Joko Widodo menegaskan untuk peningkatan kapasitas rumah sakit seperti ketersediaan oksigen dan isolasi terpusat.

Berita A11 membahas terkait ketentuan pelaku perjalanan dalam negeri sesuai peraturan PPKM Level 1 hingga 4. Disampaikan oleh juru bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 bahwa kebijakan tersebut mulai diberlakukan mulai 26 Juli 2021 hingga waktu yang tidak bisa ditentukan. Melalui surat edarannya, kebijakan yang dimaksud yaitu antara lain untuk wilayah dengan PPKM Level 3 dan 4, bagi calon penumpang transportasi udara, laut dan darat wajib menunjukkan bukti vaksin minimal dosis 1 dan PCR menunjukkan hasil negatif covid maksimal 2x24 jam. Sementara untuk hasil antigen negatif berlaku maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan. Kemudian untuk wilayah dengan PPKM level 1 dan 2, bagi calon penumpang transportasi udara, laut dan darat wajib menunjukkan hasil negatif covid-19 pada tes PCR maksimal 2x24 jam. Khusus untuk pelaku perjalanan rutin dengan transportasi darat di wilayah perkotaan tidak wajib melakukan tes PCR atau antigen. Pembatasan pelaku perjalanan juga berlaku bagi anak dibawah usia 12 tahun yang dihimbau untuk tidak melakukan perjalanan sementara waktu.

Berita A12 membahas tentang alasan Pemerintah Indonesia yang lebih memilih menerapkan pemberlakuan PPKM sebagai upaya penanganan pandemi di Indonesia daripada penerapan sistem lockdown. Suahasil Nazara sebagai Wakil Menteri Keuangan menaparkan alasan utama dari penerapan PPKM yaitu adanya kelompok masyarakat yang tinggal di pedesaan dan di perkotaan dengan kemampuan ekonomi berbeda-beda. Menurutnya, dari sektor keuangan di Indonesia nampak terjadinya dinamika lapisan masyarakat Indonesia. Hal tersebut bisa terlihat dari jumlah tabungan di bawah 1 juta dan diatas 10 juta. Bagi masyarakat dengan tabungan 1 juta sudah mulai menarik uangnya untuk kebutuhan hidup di tengah pandemi covid-19, sedangkan nilai tabungan di atas 10 juta justru meningkat di tengah pandemi. Suahasil menegaskan itulah mengapa Indonesia memilih PPKM Darurat sebagai upaya penekanan covid-19 daripada menggunakan sistem lockdown.

Berita A13 membahas soal diperbolehkannya pembelajaran tatap muka yang digelar secara terbatas pada wilayah dengan PPKM level 1 hingga 3 dengan syarat menerapkan prinsip kehati-hatian, kesehatan hingga keselamatan terhadap semua elemen pendidikan serta keluarganya. Pembelajaran tatap muka terbatas tersebut dilakukan berdasarkan atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 03/KB/2021, No. 440-717 Tahun 2021 tentang tata cara Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019, atau disebut dengan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri.

Hendarman Plt. Kemendikbudristek menjelaskan bahwa kegiatan belajar mengajar harus menyediakan jalan keluar berupa PTM terbatas dan Pembelajaran Jarak jauh dengan tidak melakukan pemaksaan apabila terdapat peserta didik yang memilih untuk PJJ. Sudah 1,5 tahun pandemi melanda Indonesia, dikhawatirkan para pelajar akan kehilangan minat belajar yang akan memberi dampak buruk.

Berita A14 membahas terkait terus diberlanjutkannya PPKM selama virus corona belum hilang yang telah dipaparkan oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investigasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya, pemberlakuan PPKM dinilai cukup efektif untuk mengendalikan mobilitas masyarakat di tengah merebaknya covid-19. Luhut mengklaim terdapat tren penurunan kasus positif covid-19 secara nasional mencapai 76% per tanggal 15 Agustus 2021. Kemudian hal tersebut juga diikuti oleh tren kesembuhan yang terus meningkat di wilayah Jawa-Bali. Ia menegaskan ada tiga elemen penting dalam menangani fenomena ini di tanah air seperti, meningkatkan cakupan vaksinasi, peningkatan 3T (testing, tracing, treatment), masyarakat yang patuh terhadap protokol kesehatan.

Selanjutnya pada berita A15 membahas soal pemerintah yang memperpanjang masa aktif PPKM Berjenjang (level 2, 3 dan 4) yang dimulai pada tanggal 24-30 Agustus 2021. Joko Widodo menyebut bahwa pemberlakuan PPKM efektif untuk menekan penularan coronavirus. Di Pulau Jawa, pada daerah aglomerasi seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, dan Surabaya telah berada di level 3 mulai tanggal 24 Agustus 2021.

Seiring dengan membaiknya kondisi tersebut, pemerintah akan melakukan penyesuaian secara bertahap. Diantaranya, tempat peribadatan boleh beroperasi dengan batas maksimal 25 persen atau setara dengan maksimal 30 orang. Untuk warung/restoran diizinkan melayani makan di tempat maksimal 25% dengan dua orang dalam satu meja dan waktu operasional dibatasi hingga pukul 8 malam waktu setempat begitupun untuk pusat perbelanjaan dengan batas pengunjung maksimal 50%, protokol kesehatan harus dipatuhi dengan disiplin, serta penggunaan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat masuk. Lalu untuk industri berorientasi ekspor diperbolehkan beroperasi 100% dengan catatan lokasi industri akan dilarang beroperasi selamalima hari apabila terdapat kasus infeksi covid-19. Presiden Joko Widodo menghimbau dilonggarkannya kembali aktivitas masyarakat dilakukan secara berangsur dengan protokol kesehatan ketat, meningkatkan testing dan tracing, serta meningkatkan cakupan vaksinasi.

Analisis Framing Suarasurabaya.Net

Portal berita online Suarasurabaya.net merupakan media lokal cukup aktif memberitakan kebijakan pemerintah pada rubric nasional dan *trend* yang sedang ramai diperbincangkan. dalam menangani wabah virus corona yang melonjak sejak setelah hari raya idul fitri pada bulan Juni 2021. Namun, bingkai pemberitaan yang dilakukan oleh Suarasurabaya.net lebih tertuju pada kebijakan pemerintah sebagai upaya menekan penyebaran virus corona. Dibawah ini peneliti akan menganalisis bagaimana Suarasurabaya.net dalam mengkonstruksi suatu realitas menjadi sebuah berita untuk dinikmati pembaca.

Define Problems

Identifikasi masalah yang dilakukan Suarasurabaya.net yakni dengan mengangkat isu terkait pembatasan untuk mobilitas masyarakat dalam kebijakan baru yang diterapkan pemerintah khusus wilayah Pulau Jawa dan Bali yaitu PPKM Darurat. Kebijakan PPKM Darurat dilakukan dengan tujuan untuk menekan angka kenaikan covid-19. Suarasurabaya.net menuliskan bahwa per tanggal 1 Juli 2021, peningkatan kasus terinfeksi virus corona mencapai 24.836 jiwa dan merupakan pencapaian tertinggi sedari awal virus corona ada di Indonesia

sehingga menilai jalan yang ditempuh pemerintah dengan memperketat kembali mobilitas masyarakat sudah sangatlah tepat. Dengan begitu, diyakini bahwa masyarakat mau tidak mau pasti akan tetap menjalankan peraturan selama masa pemberlakuan PPKM Darurat. Karena pemerintah juga akan memberlakukan hukum pidana bagi siapapun yang melanggar peraturan selama PPKM Darurat.

Hal tersebut terlihat jelas pada 15 berita yang peneliti ambil dari portal media *online* Suarasurabaya.net bahwa keseluruhan dari berita tersebut menampilkan upaya pemerintah menangani pandemi yaitu dengan mengeluarkan kebijakan dengan peraturan-peraturan baru secara bertahap. Informasi yang disampaikan oleh pemerintah terkait hal tersebut dinilai mampu berjalan sesuai tujuan.

Pada pemilihan kata yang dituangkan, Suarasurabaya.net mengklaim bahwa langkah yang diambil pemerintah semata-mata hanyalah untuk menyelamatkan nasib tanah air dari virus berbahaya ini. Dapat dilihat pada salah satu berita dengan kode A1 yang menampilkan kutipan kalimat yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yaitu:

“Situasi ini mengharuskan kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas, agar kita sama-sama bisa membendung covid-19. Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali”.

Disini, Suarasurabaya.net membingkai opini bahwa Presiden Joko Widodo memberlakukan PPKM Darurat telah melalui diskusi dengan para menteri, ahli kesehatan dan kepala daerah. Suarasurabaya.net kerap kali mengangkat berita peraturan apa saja yang harus masyarakat patuhi selama masa PPKM Darurat. Seperti dilarangnya pembelajaran tatap muka pada sektor pendidikan baik dari PAUD hingga perguruan tinggi, persyaratan bagi pelaku perjalanan, penutupan tempat peribadatan sementara, pengurangan kapasitas serta jam operasional pada sektor-sektor tertentu, dilarangnya sistem makan di restoran/warung makan. Dalam mengangkat pemberitaannya, Suarasurabaya.net hanya menekankan isu tentang kebijakan-kebijakan dari pemerintah tanpa adanya sikap mengkritisi suatu realitas serta mengambil sudut pandang diluar anggota pemerintahan.

Pada elemen pendefinisian masalah ini merupakan bingkai utama dimana suatu isu bisa saja dimaknai berbeda oleh wartawan, sehingga peristiwa yang terbentuk juga akan berbeda. Pemilihan kalimat pada teks berita mampu menggiring opini pembaca agar memihak pada media tersebut atau dapat disebut dengan peralihan isu dimana sesungguhnya banyak masyarakat yang mengeluh dengan adanya PPKM Darurat.

Diagnose Causes

Pada elemen ini digunakan untuk memperkirakan siapa aktor/pelaku dalam sebuah berita tersebut. Tampak dari teks berita secara keseluruhan, Suarasurabaya.net terlihat menjadikan pemerintah sebagai aktor utama dalam sebuah realitas yang diberitakannya. Suarasurabaya.net memberi kepercayaan terhadap Pemerintah Indonesia untuk menangani pandemi di tanah air dengan

memberlakukan peraturan yang mampu menekan kegiatan masyarakat. Dari sampel berita yang telah peneliti analisis, Suaraturabaya.net membingkai penyebab pemerintah harus menerapkan PPKM Darurat akibat Indonesia telah mencapai rekor kasus tertinggi dari awal pandemi menyerang tanah air. Namun Suaraturabaya.net menuangkan pernyataan dari Presiden Joko Widodo bahwa pemberlakuan PPKM Darurat merupakan inisiatif pemerintah pusat akibat melihat Indonesia dalam keadaan gawat covid-19. Dikatakan bahwa mau sekuat apapun pemerintah bersinergi namun tanpa adanya dukungan dari masyarakat untuk patuh, semua upaya tersebut tidak akan pernah efektif dan kasus covid-19 akan sulit dikendalikan.

Kemudian Suaraturabaya.net juga menuliskan isu kenaikan covid-19 dalam kurun waktu 1 bulan terakhir ini disebabkan oleh masuknya WNA sebagai pekerja asing berkebangsaan China melalui Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Hal tersebut membuat Wakil Ketua DPR RI meminta pemerintah tidak setengah-setengah dalam memberlakukan kebijakan PPKM. Pemerintah diharuskan berani menutup akses jalan masuk WNA ke Indonesia. Karena jika tidak begitu, apa bedanya dengan masyarakat Indonesia yang tidak patuh terhadap PPKM Darurat.

Lalu apabila covid-19 masih ada di Indonesia, pemerintah mengklaim bahwa PPKM akan terus digelar. Suaraturabaya.net melaporkan adanya pernyataan dari Wiku sebagai Jubir Gugus Tugas Penanganan Covid-19 pada berita dengan kode A3, berikut pernyataannya:

“Penting untuk diingat, kesuksesan program PPKM Darurat sangat ditentukan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan elemen masyarakat. Dalam PPKM Darurat, rapat forkopimda akan dikuatkan agar pelaksanaannya bisa efektif sampai ke tingkat komunitas,”.

Selain itu adapun pernyataan dari Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia pada berita dengan kode A14, berikut:

“Saya banyak mendapat pertanyaan apakah PPKM ini akan dilanjutkan atau dihentikan? Saya ingin menjelaskan bahwa selama pandemi covid-19 masih menjadi pandemi, PPKM akan tetap digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan mobilitas dan aktivitas masyarakat,”.

Dari kutipan diatas, pemilihan kata yang dituangkan Suaraturabaya.net bertujuan untuk menggiring opini para pembaca agar masyarakat ikut dalam mensukseskan upaya pemerintah dalam menghentikan pandemi di Indonesia. Di sisi lain, framing seperti itu justru membuat masyarakat khawatir dengan tingginya angka positif yang dibarengi dengan penerapan PPKM Darurat yang dinilai lebih ketat daripada pemberlakuan PSBB sebelumnya yang dianggap mampu menyebabkan sulitnya dalam memenuhi kebutuhan pangan untuk hidup. Kekhawatiran tersebut tidak sedikit ditakuti oleh para masyarakat menengah hingga menengah kebawah.

Suarasurabaya.net juga menulis pernyataan dari Muhadjir tentang Presiden Joko Widodo yang mengungkapkan bahwa sebenarnya ada banyak sekali resiko apabila PPKM diperpanjang, termasuk bagaimana cara menyeimbangkan antara mendisiplinkan masyarakat untuk patuh terhadap PPKM Darurat dengan penyaluran bantuan sosial. Pada berita dengan kode A8, Suarasurabaya.net menjelaskan bahwa Muhadjir menekankan bahwa bantuan sosial tidak memungkinkan apabila hanya ditanggung pemerintah saja. Namun harus dengan bantuan masyarakat dan sejumlah lembaga lainnya.

Dilihat dari pernyataan-pernyataan tersebut, isi dari hampir keseluruhan artikel yang dimuat oleh Suarasurabaya.net memang membahas tentang konsistensi kebijakan pemerintah. Namun kita tidak dapat memisahkannya dari permasalahan komunikasi yang tidak terintegrasi antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam beberapa beritanya, Suarasurabaya.net mengkonstruksi beritanya dengan memfokuskan kepada pembaca bahwa pemerintah selalu mengupayakan yang terbaik untuk beban masyarakat di tengah penerapan PPKM Darurat yaitu dengan mengotimalkan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dan pelaku usaha kecil.

Fokus dari pemberitaan yang dimuat Suarasurabaya.net secara keseluruhan adalah memberikan dukungan pada setiap upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani pandemi. Dapat dinilai dari pengkonstruksian yang dilakukan Suarasurabaya.net yang tidak pernah mengkritisi opini pemerintah yang cenderung hanya memberikan informasi dari pemerintah. Tampak bahwa Suarasurabaya.net lebih menonjolkan opini pemerintah dengan tidak menuangkan satupun opini dari masyarakat pada pemberitaannya. Tidak melihat sudut pandang dari masyarakat sama artinya bahwa masyarakat lah yang menjadi korbannya.

Make Moral Judgements

Penilaian media online Suarasurabaya.net terhadap kebijakan PPKM Darurat tersebut merujuk pada penilaian yang positif terhadap pemerintah dan cenderung pro terhadap kinerja pemerintah dengan mengupayakan kebijakan yang sesungguhnya tidak semua masyarakat dapat menerimanya dengan baik namun harus tetap dilakukan dengan harapan Indonesia bisa segera mengakhiri pandemi.

Pertama, Suarasurabaya.net menilai mampu menangani pandemi dengan baik yaitu dengan digelarnya PPKM. Hal tersebut dianggap merupakan keputusan yang tepat dalam mengendalikan wabah virus corona. Keputusan yang ditetapkan Presiden RI dalam pelaksanaan PPKM dinilai efektif dalam mengupayakan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia dari ancaman virus menular ini. Sehingga berulang kali Suarasurabaya.net memaparkan agar masyarakat tidak bersikap acuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan pemerintah di tengah pandemi ini. Suarasurabaya.net meyakinkan masyarakat dengan mengangkat berita bahwa PPKM Darurat sesungguhnya lebih efektif daripada penerapan sistem *lockdown* bagi penduduk Indonesia terutamanya faktor pada sektor bidang keuangan. Dalam berita dengan kode A12 Suarasurabaya.net menuliskan bahwa pemerintah terus

memikirkan bagaimana menangani pandemi namun tetap menciptakan suatu kebijakan untuk membantu masyarakat sesuai dengan lapisannya. Dengan itu Suarasurabaya.net sudah cukup mampu membawa pikiran pembaca untuk percaya bahwa pemerintah selalu mengambil langkah yang tepat dan mencari solusi bagi masyarakat disamping masa diberlakukannya pengetatan kegiatan masyarakat.

Kedua, Suarasurabaya.net memuat beberapa instruksi tentang peraturan pada masa PPKM yang dikeluarkan oleh para menteri pada pemberitaannya. Hampir pada keseluruhan berita yang dimuat oleh Suarasurabaya.net selalu menekankan himbauan kepada masyarakat untuk selalu patuh terhadap peraturan. Sehingga tidak heran apabila masyarakat banyak yang merasa khawatir akan kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari akibat adanya pengetatan tersebut. Namun disamping itu, pemerintah mengklaim akan menjamin semua itu dengan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat dan pengusaha kecil.

Ketiga, Suarasurabaya.net melaporkan bahwa effort pemerintah dinilai membuahkan hasil baik dengan menyatakan bahwa angka kasus positif covid-19 telah menunjukkan penurunan akibat diterapkannya PPKM Darurat. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat keterisian bed rumah sakit yang semakin berkurang. Maka dari itu secara bertahap pemerintah akan memberlakukan pelonggaran terhadap peraturan mobilitas masyarakat selama PPKM Darurat meskipun PPKM akan terus dilanjutkan hingga covid-19 masih ada di Indonesia. Komunikasi publik seperti ini mampu membuat masyarakat sedikit lebih tenang dan bernapas lega.

Berdasarkan 4 alasan diatas dengan tidak langsung kita dapat menilai kearah mana Suarasurabaya.net dalam menarik kasus ini. Dalam salah satu artikel pada beritanya, Suarasurabaya.net mengutip pernyataan dari beberapa para anggota pemerintah yang beranggapan bahwa sebenarnya pandemi dapat mudah ditangani apabila masyarakat ikut berkolaborasi bersama pemerintah dalam menyukseskan kebijakan-kebijakan dari pemerintah.

Treatment Recommendations

Berdasarkan atas segala hal yang mengharuskan pemerintah mengambil langkah tegas dalam menekan kenaikan angka positif covid-19, Suarasurabaya.net menyarankan kepada masyarakat akan hal berikut, Pertama, seluruh elemen masyarakat diharapkan untuk mendukung segala hal yang sedang diupayakan oleh pemerintah dalam menghadapi permasalahan coronavirus yang tak kunjung usai. Hal itu dapat dilakukan hanya dengan masyarakat tertib dan patuh akan pentingnya memperketat protokol kesehatan. Kedua, Suarasurabaya.net menyarankan agar masyarakat membuka mata bahwa apa yang ditetapkan pemerintah hanyalah untuk menyelamatkan masyarakat dari bahayanya virus corona. Sehingga masyarakat tidak menutup mata dengan berargumen bahwa pemerintah seenaknya sendiri dalam menetapkan kebijakan. Ketiga, masyarakat disarankan untuk memperhatikan dengan baik pernyataan pemerintah dalam memberlakukan pembatasan mobilitas masyarakat supaya publik mengetahui alasan pemerintah dalam membuat suatu kebijakan. Sehingga tidak akan menyebabkan kesalah pahaman antara pemerintah

dengan masyarakat. Hal ini ditujukan untuk menghindari masalah-masalah baru di tengah keadaan Indonesia yang sedang gawat covid-19.

Pada elemen ini terlihat jelas bahwa Suarasurabaya.net menunjukkan keberpihakannya pada pemerintah melalui isi dari teks berita yang berulang kali terkesan mendukung strategi pemerintah dengan menjelaskan maksud dari setiap kebijakan yang pemerintah tetapkan. Suarasurabaya.net hanya meonjolkan opini pemerintah. Pada keseluruhan sampel berita yang telah diamati, Suarasurabaya.net tidak menerapkan prinsip jurnalistik dengan baik yaitu dengan tidak menerapkan prinsip cover both side dalam pengkonstruksian suatu peristiwa menjadi sebuah isu/berita. Dimana Suarasurabaya.net tidak mengambil opini dari dua sudut pandang yang berbeda dalam menginformasikan sesuatu.

Keberpihakan tersebut juga tampak dari pemilihan narasumber dari keseluruhan berita Suarasurabaya.net yang peneliti ambil bahwa semuanya berpihak kepada pemerintah. Dapat dinilai bahwa Suarasurabaya.net bersifat tidak netral dan cenderung lebih memihak kaum atas. Prinsip cover both side sudah seharusnya diterapkan oleh para jurnalis dalam proses produksi suatu berita. Dalam proses peliputan berita, sangat penting melibatkan dua sudut pandang yang berbeda. Keseimbangan hal itu dapat mengacu pada fakta dan pendapat yang terdapat dalam suatu artikel. Hal ini bertujuan agar pembaca mampu memaknai isi berita tanpa adanya pengaruh dari pihak media itu sendiri. Artinya bahwa Suarasurabaya.net tidak melakukan tugasnya sebagai kontrol kebijakan justru malah menjadi corong pemerintah. Sesungguhnya hal seperti itu justru dapat menimbulkan provokasi maupun munculnya masalah-masalah baru. Seperti yang telah peneliti bahas sebelumnya dikatakan bahwa media bukanlah ruang hampa tanpa adanya faktor-faktor baik internal maupun faktor eksternal, dimana pada setiap media masing-masing pasti memiliki sisi keberpihakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis framing yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa. Suara Surabaya secara sengaja memframing pemberitaan terkait covid dalam rangka untuk menunjukkan dukungan terhadap pemerintah. Hal itu diketahui melalui berbagai pilihan judul dan informasi yang sebagian besar merupakan bentuk sosialisasi kebijakan pemerintah terkait penerapan PPKM dan juga kebijakan lainnya. Selain itu, Suara Surabaya juga meminimalisir kritik terhadap aplikasi kebijakan yang dilakukan pemerintah. Dengan demikian sebagai media massa Suara Surabaya kurang menjalankan tugasnya sebagai media massa yang seharusnya memiliki peran mengontrol kebijakan pemerintah. Dari keseluruhan artikel berita yang sudah dianalisis dengan metode framing Robert N. Entman, peneliti menemukan apabila Suarasurabaya.net telah melakukan dimensi penting framing antara lain, penyeleksian terhadap isu dan penekanan isu. Seleksi dan penekanan isu yang dilakukan Suarasurabaya.net tampak dari empat elemen perangkat framing Entman yakni mendefinisikan masalah, diagnosa sumber permasalahan, keputusan moral serta penekanan untuk mencari solusi permasalahan terhadap pemberitaan Suarasurabaya.net. Penekanan isu terjadi pada pemberitaan oleh media ini dimana Suarasurabaya.net mengangkat

berita-berita terkait PPKM Darurat dalam mengatasi virus. Meskipun Suarasurabaya.net sudah melakukan kedua dimensi diatas, namun ada satu hal yang membuat Suarasurabaya.net ini dinilai sebagai media yang selalu berpihak pada pemerintah. Suarasurabaya.net menghilangkan prinsip penting yang seharusnya digunakan dalam peliputan berita. Prinsip *cover both side*, prinsip inilah yang sayangnya Suarasurabaya.net lupakan. Suarasurabaya.net lebih condong mengambil narasumber dari pemerintah saja. Ketidakseimbangan Suarasurabaya.net dalam mengangkat opini narasumber membuat pembaca tergiring oleh opini dalam berita tersebut untuk menerima informasi bahwa kebijakan PPKM Darurat dilakukan semata-mata demi kebaikan seluruh elemen masyarakat Indonesia. Sementara nasib masyarakat menengah hingga menengah kebawah hanya dianggap bisa diselesaikan dengan penyaluran bantuan sosial. Dengan demikian tak heran apabila keseluruhan pemberitaan yang peneliti analisis, menunjukkan bahwa Suarasurabaya.net selalu mengusung opini pemerintah tanpa melihat dari sudut pandang masyarakat dengan berbagai latar belakang. Sudah semestinya bahwa media harusnya menjadi penengah antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga terciptalah komunikasi publik yang baik antara pemerintah dengan publik.

REFERENSI

- Naqqiyah, M. S. (2020). Analisis Framing Pemberitaan Media Online Cnn Indonesia. Com Dan Tirto. Id Mengenai Kasus Pandemi Covid-19. *Jurnal Kopis: Kajian Penelitian Dan Pemikiran Komunikasi Penyiaran Islam*, 39(1), 18-27.
- Boer, K. M., Pratiwi, M. R., & Muna, N. (2020). Analisis Framing Pemberitaan Generasi Milenial dan Pemerintah Terkait Covid-19 di Media Online. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 85-104.
- Palupi, M. F., & Irawan, R. E. (2020). Analisis Framing Pemberitaan Kebijakan Pemerintah Terkait Ketenagakerjaan sebagai Dampak Covid 19 di Kompas.com dan Malaysiakini. *Jurnal Representamen*, 6(02).
- Fadli, K., & Novita, P. (2021). ANALISIS FRAMING MEDIA ONLINE TENTANG PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Covid-19 Pada Media Online Tribun News. com dan Kepri. Co. id Edisi Bulan Maret s/d Juni 2020). *JURNAL PURNAMA BERAZAM*, 2(2), 172-200.
- Haloho, H. N. Y., & Salman. (2021). Framing Media Online Terhadap Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Orasi: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 12(01).
- Setiaji, W. A. D. (2021). Analisis Framing Media Online Dalam Pemberitaan Mengintensifkan Peran Kampung Tangguh Jaya Menekan Penyebaran Covid-19 (Studi pada situs berita online JawaPos.com Edisi 10 Januari 2021). *Diglosia: Jurnal Pendidikan, Kebahasaan dan Kesusastraan Indonesia Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Majalengka*, 5(2).
- Husna, P. A., Meliasanti, F., & Setiawan, H. (2021). Perbandingan Analisis Framing Berita Covid-19 pada Media Digital Kumparan.com dan Bersatu.com. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7005-7009.
- Nina, N., & Triyanto, T. (2021). Analisis Framing Pada Pemberitaan Covid-19 di Media Online Sebagai Bahan Pengembangan Modul Jurnalisme Positif. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 7(4), 1750-1758.
- Simatupang, R. (2021). Analisis Framing Pemberitaan Kompas.com Tentang COVID-19 di DKI Jakarta. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 4(1), 39-52.
- Mulyadi, U., & Mubarok, M. (2021). Konstruksi Media Terhadap Berita Awal Munculnya Covid-19 di Indonesia (Analisis Framing Pada Berita Detik.com dan Kompas.com). *Avant Garde*, 9(2), 170-182